

Article Informations
Corresponding Email:
zakiaputri2003@gmail.com

Received: 11/05/2026; Accepted:
04/06/2026; Published: 30/06/2026

DIPLOMASI VANUATU DI PBB DALAM MENGATASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI PASIFIK (2019-2024)

Zakia Putri Shaleha

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Mengkaji diplomasi Vanuatu di PBB dalam menangani perubahan iklim di Pasifik pada 2019–2024. Sebagai negara kepulauan kecil, Vanuatu menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim yang berdampak pada keamanan nasional dan sektor ekonomi, khususnya komoditas alam yang diekspor. Vanuatu berupaya menyuarakan keresahan atas ketiadaan hukum internasional yang mengikat negara penghasil emisi tinggi, salah satu penyebab utama perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk diplomasi yang digunakan Vanuatu serta dukungan internasional yang berhasil diperoleh. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara detail dan faktual. Upaya Vanuatu membuahkan hasil melalui diadopsinya resolusi perubahan iklim oleh ICJ. Hasil analisis menunjukkan bahwa Vanuatu berdiplomasi di PBB dengan memaparkan dampak perubahan iklim dan menuntut tanggung jawab negara penghasil emisi tinggi. Vanuatu juga mengajukan permintaan nasihat dari ICJ untuk mendorong adanya langkah hukum dan kebijakan yang menangani dampak negatif perubahan iklim di negaranya maupun di kawasan Pasifik yang sudah mengancam keberlangsungan hidup negara.

Kata Kunci: Diplomasi, Vanuatu, Iklim, PBB, ICJ

Abstract

Examining Vanuatu's diplomacy at the UN in addressing climate change in the Pacific in 2019–2024. As a small island nation, Vanuatu faces serious threats from climate change that impact national security and the economy, particularly its natural resource exports. This study aims to identify the forms of diplomacy employed by Vanuatu and the international support successfully secured. The method used is descriptive qualitative to describe the phenomenon in detail and factually. Vanuatu's efforts have borne fruit through the adoption of a climate change resolution by the ICJ. The analysis shows that Vanuatu has engaged in diplomacy at the UN by highlighting the impacts of climate change and demanding accountability from high-emitting countries. Vanuatu also sought advice from the ICJ to encourage legal and policy measures to address the negative impacts of climate change in its country and in the Pacific region, which threaten the survival of the nation.

Keywords : Diplomacy, Vanuatu, Climate, United Nations, ICJ

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi perubahan iklim yang dampaknya semakin nyata dan sulit untuk tidak disadari. Bencana alam yang terjadi silih berganti seperti banjir bandang, kekeringan ekstrim, kenaikan permukaan laut, hingga munculnya kerusakan ekosistem laut dan pesisir menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Perubahan iklim ini dipicu karena adanya *global warming* yang merupakan fenomena meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang memicu berbagai perubahan besar dalam sistem iklim global.

Perubahan ini tentunya memiliki pemicunya, seperti dipicu oleh aktivitas industri berskala besar yang dijalankan oleh negara-negara maju dengan tingkat produksi yang tinggi, khususnya di sektor energi, pertambangan, dan manufaktur. Negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti misalnya Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan sebagian besar negara-negara anggota Uni Eropa telah memperoleh berbagai keuntungan dari proses industrialisasi masif yang mereka lakukan sejak abad ke-19 ((Investopedia, "Industrialization,")

Perubahan iklim merupakan salah satu isu global yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang, serta negara-negara kecil di kawasan Pasifik. Dampak dari perubahan iklim ini mencakup peningkatan suhu global, kenaikan permukaan air laut, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi serta intensitas bencana alam seperti siklon dan badai. Negara-negara yang memiliki infrastruktur dan sumber daya terbatas cenderung lebih rentan dalam menghadapi perubahan ini

Negara-negara kepulauan kecil yang berada di kawasan Pasifik seperti misalnya Vanuatu, Tuvalu, Kiribati, dan Palau menghadapi tantangan lingkungan yang jauh lebih berat dibandingkan banyak negara lainnya di dunia atau bahkan pelaku-pelaku utama dari kerusakan iklim itu sendiri. Contohnya saja seperti munculnya kenaikan permukaan air laut yang secara bertahap telah memicu abrasi parah di sepanjang garis pantai negara-negara kecil tersebut. Kondisi ini jelas saja membuat adanya ketidakpastian

hidup masyarakat pesisir, yang kehidupan dan mata pencahariannya sangat bergantung pada laut sebagai sumber pangan, ekonomi, dan identitas budaya mereka. Ancaman langsung dari kenaikan air laut bukan hanya apa yang menjadi kekhawatiran negara-negara tersebut, ekosistem laut di sekitar negara-negara ini juga mengalami kerusakan serius. Terumbu karang yang selama ini memiliki fungsi sebagai pelindung alami pantai dan habitat bagi ribuan spesies laut, mengalami degradasi akibat pencemaran limbah industri, peningkatan suhu air laut, serta aktivitas pertambangan dasar laut (*deep-sea mining*) yang terus berkembang tanpa pengawasan ketat. Seringkali kegiatan eksploitasi ini dilakukan tanpa memperhitungkan dampak jangka Panjang yang dihasilkannya, sehingga hal ini dapat memperburuk kerusakan lingkungan (“Small Island Developing States Are on the Frontlines of Climate Change, Here’s Why,” *UNDP Climate Promise*)

Salah satu negara yang sangat terdampak adalah Republik Vanuatu, negara kepulauan yang terletak di wilayah Pasifik Selatan. Posisi geografis Vanuatu yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan rendah membuatnya lebih rentan terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, seperti banjir, erosi pantai, dan intrusi air laut (Namun, tantangan ini tidak hanya ditanggapi sebagai isu lingkungan semata, melainkan juga sebagai peluang bagi Vanuatu untuk memainkan peran aktif di panggung internasional sebab negara ini tidak hanya menjadi korban dari dampak perubahan iklim, tetapi juga aktor yang aktif dalam mengadvokasi keadilan iklim di berbagai forum global (IPCC, *Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate: Chapter 4: Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Islands, Coasts and Communities*,)

Vanuatu telah mengajukan sebuah resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam kebijakan iklim, didukung oleh sekitar 119 negara anggota. Resolusi ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan hukum mengenai tanggung jawab negara-negara dalam menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya terkait kerentanan negara-negara kepulauan kecil terhadap badai besar dan kenaikan permukaan laut. Melalui resolusi tersebut, Vanuatu meminta

Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memberikan opini hukum mengenai kewajiban negara-negara terhadap perubahan iklim.

Situasi ini mencerminkan kesenjangan kekuatan yang cukup signifikan dalam tata kelola lingkungan global, di mana suara negara-negara kecil yang paling rentan kerap kali tenggelam oleh kepentingan negara-negara industri. Meski demikian, langkah-langkah yang telah diambil Vanuatu patut diapresiasi sebagai bentuk perlawanan diplomatik dan advokasi hukum yang memberi contoh bahwa negara kecil pun mampu memanfaatkan instrumen hukum internasional dan solidaritas kawasan untuk memperjuangkan haknya atas lingkungan yang sehat dan aman di masa depan.

Setelah menghadapi berbagai dampak serius dari perubahan iklim, seperti erosi pantai, intrusi air laut, dan meningkatnya frekuensi badai tropis, Vanuatu tidak hanya menunjukkan ketangguhan domestik tetapi juga keberanian untuk melangkah ke ranah global. Sebagai negara berkembang dengan keterbatasan sumber daya, Vanuatu menunjukkan ketangguhan diplomatik melalui langkah strategis dalam mengangkat isu perubahan iklim ke forum-forum global.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak perubahan iklim terhadap Vanuatu, mengkaji peran resolusi yang diusulkan oleh Vanuatu di PBB dalam menyoroti tanggung jawab internasional, serta mengevaluasi bantuan dan solidaritas global yang diberikan untuk mengatasi perubahan iklim. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam melalui analisis dokumen resmi seperti resolusi PBB dan laporan kebijakan, serta observasi lapangan terhadap kondisi sosial dan lingkungan di Vanuatu. Proses penelitian meliputi studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh dampak perubahan iklim terhadap negara-negara kecil seperti Vanuatu dan menganalisis pendapat berbagai pihak tentang resolusi yang diusulkan oleh PBB ke ICJ, tanggung jawab internasional, dan bentuk bantuan dan solidaritas global yang ditawarkan. Selain itu, penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif tepat untuk meneliti fenomena diplomasi yang dilakukan oleh

Vanuatu untuk mendapatkan perhatian dari negara-negara di dunia untuk menyorot perubahan iklim yang sedang melanda dunia, terlebih negaranya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menggali dan memahami kebijakan Vanuatu dalam merespons perubahan iklim. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan makna dari fenomena sosial atau politik berdasarkan perspektif para pelaku atau aktor yang terlibat. Dalam konteks Hubungan Internasional, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika serta proses di balik interaksi antarnegara, organisasi internasional, maupun aktor non-negara.

Metode penelitian kualitatif dipilih karena sifatnya yang deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena yang kompleks dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melatarbelakangi kebijakan Vanuatu. Di lain sisi, pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan diplomasi Vanuatu dalam memperoleh dukungan internasional terhadap upaya mengatasi perubahan iklim, melalui penelitian dokumen-dokumen resmi, laporan organisasi internasional, media massa, serta publikasi ilmiah terkait. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam diplomasi yang diterapkan oleh Vanuatu dalam menghadapi perubahan iklim, termasuk bagaimana negara kepulauan kecil tersebut merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan pendekatan diplomatiknya di berbagai forum internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan eksistensinya yang terancam akibat dampak perubahan iklim.

2. PEMBAHASAN

Perubahan iklim kini dianggap sebagai isu yang besar dalam konteks politik global. Dulu isu perubahan iklim hanya dilihat sebagai urusan lingkungan biasa yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan negara atau hubungan antarnegara, namun kini dampaknya sudah menyentuh keamanan nasional dan internasional. Banyak negara mulai memperlakukan isu ini dengan serius karena berkaitan dengan stabilitas,

lintas negara, dan masa depan dari Pembangunan baik negaranya maupun dengan negara lain. Forum-forum internasional seperti PBB dan pertemuan iklim dunia menjadi ruang diskusi utama dalam merespons tantangan ini. Untuk menanganinya, dunia telah membentuk kerja sama global lewat kesepakatan seperti UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris (Richard K. Lattanzio.)

Dunia internasional merespons perubahan iklim dengan menciptakan berbagai kerangka kerja dan mekanisme multilateral yang bertujuan mengurangi dampak pemanasan global. Salah satu instrumen utama dalam upaya ini adalah *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), sebuah konvensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sejak awal 1990-an menjadi dasar koordinasi internasional dalam menanggapi perubahan iklim. Dalam kerangka UNFCCC, negara-negara berkumpul secara berkala dalam pertemuan tahunan yang disebut *Conference of the Parties* (COP). Forum ini menjadi arena negosiasi penting yang menghasilkan berbagai kesepakatan global, termasuk *Protokol Kyoto* dan *Perjanjian Paris*. Perjanjian Paris yang disepakati pada tahun 2015 menargetkan agar peningkatan suhu global tidak melebihi 2°C dan sebisa mungkin ditekan hingga 1,5°C dibandingkan era pra-industri. COP juga menjadi tempat perdebatan antara negara-negara maju dan berkembang dalam merumuskan pembagian tanggung jawab serta komitmen finansial terhadap perubahan iklim (Vanuatu ICJ Initiative)

Vanuatu aktif menyuarakan keadilan iklim dan mendesak negara-negara besar untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh emisi historis mereka. Di berbagai forum seperti COP, Vanuatu secara konsisten mendorong peningkatan ambisi iklim global serta memperjuangkan pembentukan mekanisme hukum internasional yang dapat memperjelas tanggung jawab negara-negara penghasil emisi terbesar. Salah satu langkah paling menonjol adalah inisiatif Vanuatu untuk membawa isu krisis iklim ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) guna meminta *advisory opinion* atau pendapat hukum internasional mengenai tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan global (. Tindakan ini mencerminkan bagaimana diplomasi iklim tidak lagi terbatas

pada negosiasi teknis, melainkan juga menjadi ajang perjuangan politik, etika, dan hukum demi masa depan negara-negara yang paling rentan terhadap krisis iklim.

Isu lingkungan mulai mendapat perhatian serius di tingkat global ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm pada bulan Juni tahun 1972. Ini adalah pertama kalinya seluruh negara anggota PBB berkumpul untuk membahas persoalan lingkungan secara bersama. Pada saat itu, isu perubahan iklim belum menjadi fokus utama, namun momen inilah yang menandai langkah awal yang penting dalam mengawali perjalanan dari kesadaran akan permasalahan lingkungan dalam skala global. Pada pertemuan tersebut, topik utama yang dibahas cenderung lebih banyak yang berkaitan dengan polusi udara dan air, kerusakan ekosistem, penggunaan bahan kimia berbahaya, serta limbah industri (K. Nancy, et al)

Puncak perhatian dunia terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim dalam kerangka PBB terjadi pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro, yang dikenal dengan sebutan *Earth Summit*. Dalam pertemuan besar ini, sebanyak 178 negara berkumpul dan menyepakati berbagai dokumen penting. Salah satunya adalah Deklarasi Rio, yang memuat 27 prinsip dasar mengenai bagaimana pembangunan dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan. Konferensi ini juga menghasilkan Agenda 21, yakni sebuah panduan atas aksi global untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Tak kalah penting, *Earth Summit* juga menjadi titik lahirnya Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang sejak itu menjadi pondasi utama dalam negosiasi dan kerja sama internasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mengatasi krisis iklim (Purba, Bobby)

Upaya Pengangkatan Isu Perubahan Iklim di Forum Internasional

Vanuatu secara tegas mengingatkan dunia tentang ancaman serius yang mereka hadapi, mulai dari naiknya permukaan laut yang mengancam pemukiman, seringnya badai tropis yang merusak infrastruktur, hingga potensi hilangnya wilayah daratan dan identitas bangsa mereka karena

dampak krisis iklim yang semakin parah. Vanuatu menyadari posisinya sebagai negara yang rentan terhadap dampak dari perubahan iklim, dan minimnya perhatian yang bisa diperoleh karena posisinya sebagai negara kecil, maka penting untuk membahas awalan yang dimulai Vanuatu dalam upaya mengangkat isu perubahan iklim menjadi hal yang kemudian menjadi perhatian di forum internasional.

Vanuatu mengajukan resolusi perubahan iklim di PBB dengan menyoroti dampak nyata dari krisis iklim, seperti pemutihan terumbu karang di *Great Barrier Reef* dan ketergantungan masyarakat Pasifik terhadap ekosistem laut yang rentan. Isu ini menunjukkan bagaimana perubahan iklim secara langsung mengancam sumber penghidupan dan perlindungan alami bagi masyarakat di Vanuatu dan negara-negara Pasifik lainnya. (Climate Action Network Internasional)

Walaupun upaya Vanuatu untuk membawa isu perubahan iklim ke Mahkamah Internasional (ICJ) mendapat dukungan dari banyak negara, beberapa kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia cenderung berhati-hati dan enggan memberikan dukungan penuh. Mereka khawatir hasil dari pendapat hukum ICJ dapat mempersempit ruang gerak kebijakan nasional mereka, terutama terkait tanggung jawab atas emisi gas rumah kaca. Sikap hati-hati negara-negara besar ini seringkali membuat proses perundingan berjalan lamban dan penuh dengan tarik ulur, karena setiap langkah harus melewati proses kompromi yang tidak mudah (Vanuatu Dorong Resolusi PBB yang Utamakan HAM dalam Kebijakan Iklim)

Posisi Vanuatu dalam Lingkup Global

Vanuatu secara aktif mendorong agar isu perubahan iklim tidak lagi dianggap hanya sebagai masalah lingkungan, melainkan diakui sebagai ancaman serius terhadap keamanan, hak asasi manusia (HAM), dan bahkan keberlangsungan hidup negara-negara kepulauan kecil. Menteri Perencanaan dan Adaptasi Perubahan Iklim Vanuatu, Ralph Regenvanu, menegaskan di berbagai forum internasional bahwa bencana topan tropis besar telah menyebabkan ribuan warga Vanuatu kehilangan tempat tinggal, menghancurkan infrastruktur penting, dan memaksa banyak orang mengungsi. Kondisi inilah yang mendorong Vanuatu mengajukan resolusi di

PBB, menuntut agar dampak perubahan iklim menjadi perhatian utama, sekaligus meminta penegasan hukum mengenai kewajiban negara-negara dalam menangani krisis iklim. Ralph Regenvanu menegaskan bahwa resolusi yang didukung oleh lebih dari 119 negara ini bukan ditujukan untuk menyalahkan negara manapun, melainkan untuk memperoleh arahan hukum internasional yang jelas dan tegas. Resolusi ini juga menekankan pentingnya perlindungan hukum dan pengakuan global bagi negara-negara kepulauan kecil, yang posisinya sangat rentan dan terancam keberadaannya akibat dampak perubahan iklim yang kian memburuk.

Langkah Vanuatu di PBB

Diplomasi Vanuatu di PBB mencerminkan bagaimana sebuah negara kecil dengan sumber daya terbatas dapat memainkan peran strategis dalam isu global yang kompleks seperti perubahan iklim. Kesadaran Vanuatu akan posisinya sebagai negara kepulauan kecil yang sangat rentan terhadap dampak krisis iklim justru menjadi kekuatan moral yang mereka manfaatkan dalam arena diplomasi internasional. Dalam melakukan upaya untuk menyuarakan keresahan akan adanya dampak dari perubahan iklim di Pasifik, Vanuatu mulai secara intens melakukan kampanye aktif sejak tahun 2019.

Kekuatan diplomasi Vanuatu tidak terletak pada kekuatan ekonomi atau politik konvensional, melainkan pada kemampuannya membangun koalisi strategis, baik di tingkat regional melalui *Pacific Islands Forum* (PIF), maupun di tingkat global melalui *Alliance of Small Island States* (AOSIS).

Pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP25) yang berlangsung di Madrid, Spanyol, Desember 2019, Vanuatu tampil sebagai salah satu negara yang paling vokal dalam menyuarakan keresahan negara-negara kepulauan kecil yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Di forum ini, Vanuatu tidak hanya membawa isu lingkungan, tapi juga memperjuangkan keadilan iklim dan kelangsungan hidup negaranya dan negara-negara kecil lainnya.

Vanuatu menegaskan bahwa adaptasi dan *loss and damage* harus dipandang sebagai prioritas yang setara dengan upaya mitigasi. Adaptasi mencakup langkah-langkah jangka panjang untuk membantu negara-negara

rentan beradaptasi terhadap perubahan iklim yang tidak terhindarkan, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, perlindungan ekosistem pesisir, dan diversifikasi ekonomi lokal. Sementara itu, *loss and damage* mengacu pada kerugian yang sudah tidak bisa dihindari maupun diperbaiki, di mana negara-negara seperti Vanuatu membutuhkan dukungan finansial dan teknis untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak langsung.

Vanuatu memulai dengan membuat dan mengajukan sebuah usulan keputusan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Usulan ini meminta ICJ untuk memberikan pendapat nasihat tentang kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh negara-negara dalam menghadapi perubahan iklim. Inisiatif ini didukung oleh Vanuatu bersama kelompok negara lain seperti AOSIS. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan hukum mengenai perlindungan sistem iklim dan dampak hukum bagi negara-negara yang bertindak atau lalai sehingga menyebabkan kerusakan pada iklim (Vanuatu Dorong Resolusi PBB yang Utamakan HAM dalam Kebijakan Iklim)

Hingga pada akhir tahun 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) resmi mengadakan sidang besar terkait perubahan iklim di Den Haag. Sidang ini menjadi pertemuan dengan jumlah peserta terbanyak dalam sejarah ICJ, menandai sebuah momen penting di mana isu krisis iklim diangkat ke tingkat pengadilan tertinggi internasional. Partisipasi yang luar biasa banyak dari berbagai negara menunjukkan betapa mendesaknya isu ini dalam agenda global. Sidang ini tidak hanya menarik perhatian negara-negara besar, tetapi juga mendapatkan dukungan kuat dari negara-negara pulau kecil yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kehadiran mereka secara aktif menyuarakan tantangan dan risiko yang dihadapi komunitas mereka akibat kenaikan permukaan laut dan perubahan cuaca ekstrem. Ini mencerminkan keberhasilan diplomasi Vanuatu dan aliansi negara-negara kecil dalam menggalang solidaritas internasional untuk memperjuangkan keadilan iklim (“Sidang Terbesar Perubahan Iklim oleh Mahkamah Internasional,”)

KESIMPULAN

Diplomasi yang dilakukan Vanuatu antara lain dengan melakukan advokasi di forum COP25 Madrid. Dalam forum ini, Vanuatu tidak hanya menyuarakan kekhawatiran negara-negara pulau kecil terhadap dampak perubahan iklim, tetapi juga mendorong terbentuknya komitmen global yang lebih kuat untuk melindungi wilayah yang terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan laut. Upaya diplomatik ini menjadi pijakan awal untuk membangun dukungan internasional dari negara-negara lain, baik yang terdampak langsung maupun yang memiliki peran besar dalam mitigasi dan adaptasi iklim.

Selain itu, Vanuatu melanjutkan langkahnya dengan mengajukan resolusi kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta *advisory opinion* dari Mahkamah Internasional (ICJ) terkait kewajiban hukum negara-negara anggota dalam menghadapi krisis iklim. Resolusi ini berhasil mendapatkan dukungan luas dan akhirnya memicu diselenggarakannya sidang besar di ICJ yang berlangsung di Den Haag, Belanda. Sidang tersebut membahas secara mendalam implikasi hukum dari perubahan iklim yang akan mengawali langkah Vanuatu menuju tahapan selanjutnya.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

- Adara Relief International. "Kita dalam Bahaya Sekarang': Vanuatu Deklarasikan Darurat Iklim." 30 Maret 2023. Diakses 3 Maret 2025. <https://adararelief.com/kita-dalam-bahaya-sekarang-vanuatu-deklarasikan-darurat-iklim/>.
- Boby Purba. "Resolusi Perubahan Iklim Vanuatu di PBB dan Dampaknya terhadap Great Barrier Reef." *Kumparan*, 25 Juni 2025. Diakses 6 Agustus 2025. <https://kumparan.com/boby-purba/resolusi-perubahan-iklim-vanuatu-di-pbb-dan-dampak-terhadap-great-barrier-reef-24o9ljwLrU>.
- Climate Action Network International. "Thousands of Civil Society Organisations Call on Countries to Support Vanuatu Climate Justice

Initiative." 5 Mei 2022. Diakses 3 Agustus 2025.
<https://climatenetwork.org/2022/05/05/thousands-of-civil-society-organisations-call-on-countries-to-support-vanuatu-climate-justice-initiative/>.

Intergovernmental Panel on Climate Change. *Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate: Chapter 4: Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Islands, Coasts and Communities*. 2019. Diakses 12 Juni 2025.
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2022/03/06_SROCC_Ch04_FINAL.pdf.

Investopedia. "Industrialization." *Investopedia*. n.d. Diakses 15 Juli 2025.
<https://www.investopedia.com/terms/i/industrialization.asp>.

Lattanzio, Richard K. *The United Nations Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol, and the Paris Agreement: A Summary*. Congressional Research Service, 29 Januari 2020. Diakses 28 Juli 2025. <https://www.congress.gov/crs-product/R46204>.

Kubasek, Nancy K., dan Gary S. Silverman. *Environmental Law*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Nasser, Nur Asyraf Munif Junaidy. "Peran Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Internasional."

SPREP (Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme). "Team Pacific at the UNFCCC COP 25 in Madrid, Spain." 14 Desember 2019. Diakses 5 Agustus 2025. <https://www.sprep.org/news/team-pacific-at-the-unfccc-cop25-in-madrid-spain-4>.

United Nations Development Programme. "Small Island Developing States Are on the Frontlines of Climate Change — Here's Why." *UNDP Climate Promise*. 30 April 2024. Diakses 14 Juli 2025.
<https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/small-island-developing-states-are-frontlines-climate-change-heres-why>.

Vanuatu ICJ Initiative. "Resolution: Request for an Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Obligations of States in Respect of Climate Change." 29 Maret 2023. Diakses 23 April 2025.
<https://www.vanuatuicj.com/resolution>.

“Sidang Terbesar Perubahan Iklim oleh Mahkamah Internasional.” *Kompas Lestari*. 2 Desember 2024. Diakses 5 Agustus 2025.
<https://www.lestari.kompas.com/read/2024/12/02/110000786/mahkamah-internasional-buka-sidang-perubahan-iklim-terbesar-ini>.

“Vanuatu Dorong Resolusi PBB yang Utamakan HAM dalam Kebijakan Iklim.” *Antara News*. 30 Maret 2023. Diakses 3 Agustus 2025.
<https://www.antaraneews.com/berita/3455145/vanuatu-dorong-resolusi-pbb-yang-utamakan-ham-dalam-kebijakan-iklim>.